

✓ Ancam Menggugat

SITE Manager PT Promits Werry Syahril tetap ngotot agar PDAM Pontianak membayar Rp6 miliar. Hal itu ditegaskannya kepada sejumlah wartawan, Rabu (9/2) saat konferensi pers di Pontianak.



Werry Syahril

Werry mempertanyakan soal audit BPK dan BPKP terkait proyek PIPANISASI PDAM yang dilaksanakan oleh PT Promits. "Saya pertanyakan dulu soal audit. Yang diaudit itu apa? Perjanjian ya? Yang namanya kontrak itu adalah perjanjian. Kalau diaudit, kenapa

hanya PDAM saja, tapi saya tidak diaudit? Saya minta diaudit, tapi tidak pernah sampai sekarang saya diaudit?" ungkap Werry.

"Kalau saya sudah konfirmasi ke BPKP dan

• ke halaman 15 kolom 1

Ancam Menggugat ✓

Sambungan dari halaman 9

pertanyakan di DPRD bahwa BPKP tidak pernah melaksanakan audit waktu itu, tapi menghitung. Ini bukan audit. Yang dihitung progress. Progress kami hitung waktu itu 92 persen, akhirnya mereka hitung hanya 87,2 persen," tegas Werry. Menurut Werry sudah pernah diselesaikan dalam musyawarah. Karena sudah ada di dalam kontrak itu. Dalam musyawarah itu ia menagih 92 persen. Tapi, yang terjadi PDAM mau membayar 87,2 persen saja, sesuai dengan hasil hitungan BPKP dan bukan hasil audit.

"Kalau ini hasil audit, terus terang akan saya gugat ini. Siapa nyuruh diaudit. Kalau diaudit, kenapa saya tidak diaudit. Akhirnya hasil kesepakatan itu 87,2 persen, dan saya juga sepakat. Jadi, ya bayarlah," tegasnya.

Ia menambahkan, "Rp2 miliar lebih ini hanya hitungan progress. Saya sepakat. Wajar kalau Wali Kota menyuruh PDAM untuk membayar. Karena itu memang yang ditagih.

Tetapi, tagihan lain mana. Ini kan harus dibayar juga."

Mungkin, tegasnya, Wali Kota tidak tahu ada tagihan lain. Bahkan Wali Kota juga dianggap tidak tahu pemutusan kontrak itu tidak benar. "Dan semua ini juga dipotong, sehingga bukan Rp2 miliar lebih yang dibayar, namun hanya Rp1,4 m," kata Werry.

Jelas saja Werry menolaknya. "Mana saya mau kalau PDAM hanya bayar Rp1,4 m. Padahal Walikota Sutarmidji sudah menyuruh membayar Rp2,4 miliar. Makanya saya laporkan ke Polda Kalbar sebab hal ini sama saja dengan penipuan bahkan penggelapan," paparnya. Padahal kalau dihitung kerugian baik materil dan immateril, ia mengaku capai Rp22 M. Namun tidak sebesar itu. "Sebab saat saya di dewan maupun di mana-mana, kalau PDAM tidak punya duit, Rp1.000 saja saya terima, asalkan PDAM mau mengakui kesalahannya. Sampai saat ini PDAM tidak mampu membuktikan kebenarannya," ucapnya.

Akibat permasalahan ini, kata dia, harusnya proyek

pipanisasi yang tuntas akhir Desember 2009 terbengkalai dan putus. Padahal, jika selesai, masyarakat sudah bisa menikmati air bersih dari proyek tersebut. Bahkan bisa menikmati air langsung dari kran.

"Belum lagi jalan rusak satu tahun bisa diperbaiki. Kami pelaksana siap melaksanakan itu tapi disetop sepihak. Nah, yang bikin hancur Kota Pontianak itu siapa sebenarnya," tanyanya.

Ia menjelaskan, masalah ini tidak semudah apa yang dilihat karena ada hal mendasar mengapa pembayaran tidak dilakukan, yaitu proyek lanjutan yang otomatis diperoleh pihaknya. Namun terganjal oleh putusan sepihak tersebut.

"Ini ada latar belakangnya, yaitu proyek lain miliar rupiah, karena jika proyek ini tuntas, pastinya proyek lain senilai Rp 62 miliar otomatis ke saya. Namun, yang jelas saya mau masalah ini dituntaskan segera. Bayar dong sesuai yang saya tagih selain 87,2 persen dari progress itu. Tagihan lain senilai Rp 6,9 miliar lebih

itu, kok dipotong-potong," katanya.

Namun, jika Wali Kota beralasan pihaknya enggan membayar sesuai apa yang diklaim PT Promits karena takut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan BPK dan BPKP, Ketua Pemprov Lemkari Kalbar ini siap menggugat kedua lembaga tersebut. Karena, tegasnya, BPK maupun BPKP tidak berhak untuk memerintahkan pembayaran tersebut.

"Kita akan gugat BPK dan BPKP jika mereka memerintahkan hal itu, dan mana surat perintahnya, karena yang berhak untuk memerintahkan pembayaran tersebut adalah konsultan proyek dan kontraktor itu sendiri," tegasnya.

Pihaknya siap membawa masalah ini hingga hukum yang lebih tinggi, karena jika wali kota tetap tidak mau membayar sesuai dengan klaim PT Promits, ia memastikan nilai kerugian yang harus dibayar pemerintah bisa lebih besar jika masalah ini berujung ke pengadilan, dengan total Rp 22,69 miliar, yang terdiri dari kerugian material dan immaterial. (ody)